

The Influence of Implementing Regional Accounting Systems and Human Resource Competence on Financial Report Information at the Tabalong Regency Civil Registry Service Office

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Daerah Dan Kompetensi SDM Terhadap Informasi Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

Fakhri¹, Maria Ester Yellyta²

¹²STIE Pancasetia Banjarmasin

*fakhrizidane@gmail.com, maria.ester474@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap informasi laporan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap informasi laporan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, serta untuk mengetahui variabel dominan yang berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Sedangkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Parsial dan Signifikan Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Dominan Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Daerah, Kompetensi SDM, Informasi Laporan Keuangan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and analyze the influence of the application of the regional financial accounting system and human resource competency on regional financial report information at the Population and Civil Registration Service of Tabalong Regency, and to determine and analyze the influence of the application of the regional financial accounting system and human resource competency on the influence partially on regional financial report information at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service, as well as to determine the dominant variables that influence regional financial report information at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service. The results of the research show that the Regional Financial Accounting System and Human Resource Competency Simultaneously Influence Regional Financial Report Information at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service. Meanwhile, the implementation of the Regional Financial Accounting System does not have a partially significant effect on the Regional Financial Report Information at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service. Human Resource Competency Partially and Significantly Influences Information on Regional Financial Reports at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service. Human Resource Competency Dominantly

Influences Information on Regional Financial Reports at the Tabalong Regency Population and Civil Registration Service.

Keywords: *Regional Accounting System, HR Competence, Information Financial Report, Department of Population and Registration Civil*

Pendahuluan

Pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun, 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang disusun oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.59 Tahun, 2007).

Mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Salah satu SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, karena pada objek tersebut terdapat fenomena evaluasi Badan Pemeriksaan Keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan SKPD tersebut yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian pada umumnya memiliki pengendalian internal yang telah memadai. Laporan pemerintah daerah yang memperoleh opini tidak wajar dan tidak memperoleh opini memerlukan perbaikan pengendalian internal dalam hal keandalan informasi yang disajikan (Widari, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian internal akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Laporan belum didukung SDM yang memadai, seperti: pemisahan tugas dan fungsi, satuan pengawas intern tidak optimal

Fenomena di atas menggambarkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi baik dalam pelaporan maupun penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan masih belum seluruhnya memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulia, 2018). Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di SKPD pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. (Siwambudi, 2017).

Selain opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan terkait informasi sistem akuntansi daerah yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yaitu sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (single entry accounting system) berbasis kas (basis cash). Sistem pencatatan single entry ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry sangat sederhana dan mudah dipahami, namun disamping itu juga mempunyai banyak kelemahan masyarakat (Suarmika, 2016).

Kompetensi SDM dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan dan terhindar dari kesalahan pencatatan maupun perhitungan. Kompetensi SDM yakni SDM yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019).

SDM yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan sesuai dengan waktunya (Anggreni dkk., 2018).

Tersedianya sebuah sistem yang mendukung kinerja para pegawai sangat diperlukan. Menurut Renyowijoyo (2013) akuntansi keuangan daerah yakni akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mampu membuat informasi berupa laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD. Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017).

Isu ini menarik untuk diteliti karena masih terdapat beberapa permasalahan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong terkait nilai informasi laporan keuangan yang disajikan. Serta fenomena menguatnya tuntutan dari masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan serta kinerja manajemen baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Sektor Publik menurut Halim (2018) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah informasi apabila diubah ke dalam konteks yang memberikan makna (Wilkinson, 2000).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/ Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.

Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
3. Perencanaan dan Informasi Otoritas (*Planning and Authorization Information*)
4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
6. Sumber Fakta dan Gambaran

Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Didalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa pemerintah harus menyajikan komponen laporan keuangan. Berikut adalah 4 komponen laporan keuangan:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasi aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang

diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. (Sumber: PP 71 Tahun 2010)

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP. (Sumber: PP 71 Tahun 2010)

3. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Sumber: PP 71 Tahun 2010.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Terkait dengan tujuan laporan keuangan, pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik. Agar tujuan laporan keuangan tersebut tercapai, maka didalam Standar Akuntansi Pemerintahan telah diatur karakteristik kualitatif laporan keuangan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu;

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Pemendagri No 64 Tahun 2013 Pasal 05 tentang PSAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Menurut Fatmala (2014) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Fathia (2017) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2021), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut.

Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2015).

Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts dalam Lian (2018:17), skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2018) dalam, skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya (Kuncoro, 2013:10). Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan sejumlah sampel dan data-data numerikal atau berupa angka dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Sugiyono, 2018:7).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawavariasi pada suatu nilai. Dalam penelitian ini, digunakan dua macam variabel penelitian.

a. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

b. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah kompetensi sumber daya manusia (X_1) dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (X_2)

Tabel 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Sistem Akuntansi Daerah (X_1)	Menurut Abdul, (2017) sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD	1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic (Permendagri No. 21 Tahun, 2011)	Skala Likert
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)	Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan atau keahlian individu di dalam sebuah organisasi atau suatu system lembaga untuk mengimplementasikan skillnya dan melaksanakan fungsi serta kewenangannya dalam mencapai tujuannya	1. Kemampuan 2. Keterampilan 3. Sikap/perilaku (Hutapea, P., & Thoha, 2018)	Skala Likert

	secara efektif dan efisien (Emilda, 2014)		
Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y)	Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun, 2010).	1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun, 2010)	Skala Likert

Sumber: data diolah 2023

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Disdukcapil Kabupaten Tabalong, berikut rincian dari jumlah populasi yang digunakan :

Tabel 2 Jumlah SKPD di Kabupaten Tabalong

No	Nama	Jumlah Populasi
1	SEKRETARIAT DAERAH	107 Orang
2	SEKRETARIAT DPRD	28 Orang
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34 Orang
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24 Orang
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17 Orang
6	BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH	14 Orang
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	27 Orang
8	BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	37 Orang
9	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	21 Orang
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25 Orang
11	DINAS KESEHATAN	271 Orang
12	DINAS KET. PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	116 Orang
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25 Orang
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDAG.	71 Orang
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	72 Orang
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61 Orang
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19 Orang
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	19 Orang
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	85 Orang

No	Nama	Jumlah Populasi
20	DINAS PERHUBUNGAN	34 Orang
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	29 Orang
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25 Orang
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24 Orang
24	DINAS PPPAPP DAN KB	24 Orang
25	DINAS SOSIAL	21 Orang
26	DINAS TENAGA KERJA	35 Orang
27	INSPEKTORAT	37 Orang
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	41 Orang
29	RSUD H BADARUDIN TANJUNG	237 Orang
30	KECAMATAN MURUNG PUDAK	46 Orang
31	KECAMATAN BANUA LAWAS	18 Orang
32	KECAMATAN J A R O	14 Orang
33	KECAMATAN HARUAI	11 Orang
34	KECAMATAN BINTANG ARA	11 Orang
35	KECAMATAN TANJUNG	44 Orang
36	KECAMATAN TANTA	21 Orang
37	KECAMATAN MUARA HARUS	15 Orang
38	KECAMATAN MUARA UYA	13 Orang
39	KECAMATAN UPAU	9 Orang
	Jumlah	1782 Orang

Sumber : <https://simpeg.tabalong.go.id>, di akses tanggal 30 Maret 2023

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian sampel yang telah disebutkan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 78 responden, dengan asumsi jumlah SKPD ada 39 maka masing-masing SKPD mewakili jumlah sampel responden masing-masing 2 orang di Lingkungan pemerintahan kabupaten Tabalong.

Teknik Pengumpulan Data

Berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada perpustakaan dengan membaca buku-buku literatur guna memperoleh, mengumpulkan data dan menilai data yang lebih akurat untuk membantu penulis dalam mengembangkan topik bahasan yang berkaitan dengan judul yang penulis pilih.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan cara :

a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh bahan dan data-data dalam menganalisa masalah yang ada.

- b. Dokumentasi
Yaitu penulis mengadakan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah objek yang diteliti dengan hasil survey yang dilakukan. Sehingga, hasil pencatatan yang di peroleh sesuai dengan informasi yang di dapat dari tempat penelitian.
- c. Wawancara
Yaitu penulis melakukan sesi wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian secara real guna memperoleh informasi tentang objek yang diteliti.
- d. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan dan tahu apa yang bisa di harapkan dari responden. Agar mempermudah responden dalam memberikan jawaban, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disertakan pilihan - pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden dengan menggunakan rumus skala likert.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mendeskripsikan data, menguji pesyaratan analisis. Untuk mendeskripsikan data setiap variabel, digunakan statistik. Penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk mencari skor tertinggi, terendah, mean, median, modus dan standar deviasi.

Sementara untuk menguji hipotesis dan menyatakan kejelasan tentang kekuatan variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini digunakan analisis Regresi Linear Berganda, dan dalam pengolahan data digunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Hasil dan Pembahasan

Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat diketahui profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan gambaran umum keadaan atau kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengajukan seperangkat kuesioner kepada para responden yang berjumlah 78 pegawai yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Kuesioner tersebut kemudian diteliti lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik program SPSS.

Kuesioner yang diajukan terdiri dari sejumlah pernyataan-pernyataan yang mewakili tiga variabel sesuai dengan jumlah variabel yang ada. Ketiga instrument penelitian yang berbentuk kuesioner ini adalah tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Informasi Laporan Keuangan Daerah. Penulisan ketiga instrument tersebut menggunakan skala likert untuk setiap item pertanyaan yang diajukan mempunyai skala jawaban 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk setiap item, skor tertinggi adalah 5 yaitu jawaban sangat setuju sedangkan skor terendah adalah 1 yaitu jawaban sangat tidak setuju. Untuk lebih lengkapnya hasil penyebaran kuesioner seperti pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Total
------------	-------

Kuesioner yang disebar	78
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang kembali	78
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Kuesioner yang dapat diolah	78
Tingkat respon kuesioner	100%
Tingkat respon kuesioner yang diolah	100%

Sumber : Hasil Responden (Data Diolah Kembali Tahun 2023)

Dari data diatas menunjukan, dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 78 kuesioner yang kembali sebanyak 78. Hal ini menunjukan tingkat partisipasi responden sangat tinggi terhadap penelitian ini, yaitu sekitar 100%

Karakteristik Responden

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang berjumlah 78 responden. Data responden yang diperoleh berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, latar belakang pendidikan dan lama bekerja :

Tabel 4 Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Frekuensi	Prosentase
1	Jenis Kelamin :		
	a. Laki-laki	56	71,80
	b. Perempuan	22	28,20
2	Usia :		
	a. 20 – 30 tahun	10	12,8
	b. 31 – 40 tahun	28	28,9
	c. 41 - 50 tahun	35	44,9
	d. 51 ke atas	5	6,4
3	Pendidikan Terakhir:		
	a. SLTA atau setingkat	10	12,8
	b. D3/ Setingkat	25	32,1
	c. Sarjana 1 (S1)	21	26,9
	d. Sarjana 2 (S2)	22	28,2
4	Latar Belakang Pendidikan:		
	a. Akuntansi	35	44,9
	b. Manajemen	34	43,6
	c. Hukum	6	7,7
	d. IT	3	3,8
5	Jabatan Terakhir		
	a. Kepala Instansi/ Lembaga	30	38,5
	b. Staf subbag keuangan	45	57,7
	c. Kasubag Keuangan	2	2,6
	d. Lainnya....	1	1,3
6	Masa Kerja :		
	a. < 5 tahun	8	10,3
	b. 6 - 10 tahun	22	28,2
	c. 11 - 15 tahun	33	42,3

No.	Karakteristik	Frekuensi	Prosentase
	d. > 15 tahun	15	19,2

Sumber : Hasil Responden (Data Diolah Kembali Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner diisi oleh 22 responden perempuan atau sebesar 28,2% dari jumlah responden dan 56 orang responden laki-laki atau sebesar 71,8% dari jumlah responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Laki-laki dalam memegang jabatan disetiap bagian.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada kinerja pegawai. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, ketelitian dalam berkerja, konsentrasi dan kesehatan fisik dalam berkerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Data dari usia responden yang mengisi kuesioner yang paling dominan berada di usia 41 – 50 tahun sebanyak 35 orang atau 44,9%, usia 20 – 30 tahun sebanyak 10 orang atau 12,8%, usia di 31 – 40 dan 51 tahun keatas masing-masing sebanyak 26 orang (35,9%) dan 5 orang (6,4%), ini menunjukkan sebagian besar pegawai yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berusia berpengalaman dan hamper mendekati pensiun.

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang karyawan maka akan semakin tinggi pula pola kinerja yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik pendidikan pendidikan akhir SLTA sebanyak 10 orang (12,8%) dan dengan tingkat D3 dan Sarjana (S1) sebanyak 25 orang (32,1%) dan 21 orang (26,9%), sedangkan tingkat Magiser (S2) sebanyak 22 orang (28,2%). hal ini menunjukkan tingkat pendidikan yang adai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sudah sangat memadai. Sementara latar belakang pendidikan responden di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk ilmu Akuntansi sebanyak 35 orang (44,9%), ilmu manajemen sebanyak 34 (43,6%), dan untuk Ilmu Hukum dan Informasi Teknologi masing-masing sebanyak 6 orang (7,7%) dan 3 (3,8%).

Berdasarkan informasi yang ada pada Tabel menunjukan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berada pada posisi Staf Subbag Keuangan sebanyak 45 orang atau 57,7%, responden pada posisi Kasubbag Keuangan sebanyak 2 orang atau 2,6%, dan untuk pemegang jabatan Kepala Instansi/ Lembaga sebanyak 30 orang (38,5%) sedangkan responden dengan posisi lainnya sebanyak 1 orang atau 1.3%.

Selain tingkat umur, masa kerja juga dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai semakin lama seorang pegawai berkerja semakin banyak pengalaman kerja yang dimilikinya. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, memiliki masa kerja yang berbeda, ini dapat dilihat pada table di atas yaitu masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 8 orang atau sebesar 10,3%, responden dengan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 22 orang atau sebesar 28,2%, responden dengan masa kerja 11-15 tahun dan lebih dari 15 tahun masing-masing memiliki jumlah yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 42,3% dan 15 orang atau sebesar 19,2% dari jumlah responden.

Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

Deskripsi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Karakteristik Jawaban Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

No	Keterangan	Skor	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat setuju	5	89	38.36

2	Setuju	4	63	27.16
3	Netral	3	15	6.47
4	Tidak setuju	2	65	28.02
5	Sangat tidak setuju	1	0	-

Sumber : Hasil Responden (Data Diolah Kembali Tahun 2023)

Dari hasil tabel bahwa responden yang memilih pendapat sangat setuju terkait variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai 5 sebanyak 89 frekuensi (38,36%), memilih setuju dengan nilai 4 sebanyak 63 frekuensi (27,16%), memilih netral sebanyak 15 frekuensi (6,47%) dan tidak setuju sebanyak 65 frekuensi (28,02), sangat tidak setuju, tidak ada nilai.

Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Tabel 6 Karakteristik Jawaban Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

No	Keterangan	Skor	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat setuju	5	265	56.99
2	Setuju	4	200	43.01
3	Netral	3	-	
4	Tidak setuju	2	-	
5	Sangat tidak setuju	1	-	

Sumber : Hasil Responden (Data Diolah Kembali Tahun 2023)

Dari hasil tabel diatas dapat kita lihat bahwasannya dari 78 responden yang di temui dan penelitian di lapangan, peneliti berhasil mendapatkan hasil data bahwa responden yang memilih pendapat sangat setuju terkait variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai 5 sebanyak 265 frekuensi (56,99%), memilih setuju dengan nilai 4 sebanyak 200 frekuensi (43,01%), sementara memilih netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak ada nilai

Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden Variabel Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y)

Tabel 7 Karakteristik Jawaban Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y)

No	Keterangan	Skor	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat setuju	5	127	54.51
2	Setuju	4	106	45.49
3	Netral	3	0	-
4	Tidak setuju	2	0	-
5	Sangat tidak setuju	1	0	-

Sumber : Hasil Responden (Data Diolah Kembali Tahun 2023)

Dari hasil tabel diatas bahwa responden yang memilih pendapat sangat setuju terkait variabel Informasi Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai 5 sebanyak 127 frekuensi (54,51%), memilih setuju dengan nilai 4 sebanyak 106 frekuensi (45,49%), sementara memilih netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak ada nilai.

Hasil Uji Kualitas Variabel

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrument penelitian dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrument tersebut mengukur apa sebenarnya yang diukur. Uji validitas merupakan uji yang menunjukkan seberapa besar item-item pernyataan mewakili konsep atau variabel yang diukur. Sebuah angket atau kuisioner bisa dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel, jika nilai r hitung $<$ r tabel maka angket atau kuisioner dinyatakan tidak valid.

Diketahui : Nilai rtabel dengan n sampel 78 responden dan tingkat kesalahan 5% adalah 0,2227. Menentukan validitas suatu pernyataan digunakan program SPSS 22 for windows. Hasil uji validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Uji Validitas

Variabel	Item	R. hitung	R. tabel	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	X1.1	0,980	0,2227	Valid
	X1.2	0,983	0,2227	Valid
	X1.3	0,985	0,2227	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	X2.1	0,872	0,2227	Valid
	X2.2	0,895	0,2227	Valid
	X2.3	0,898	0,2227	Valid
	X2.4	0,915	0,2227	Valid
	X2.5	0,917	0,2227	Valid
	X2.6	0,905	0,2227	Valid
Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,860	0,2227	Valid
	Y2	0,923	0,2227	Valid
	Y3	0,920	0,2227	Valid
	Y4	0,936	0,2227	Valid
	Y5	0,936	0,2227	Valid
	Y6	0,936	0,2227	Valid
	Y7	0,937	0,2227	Valid
	Y8	0,902	0,2227	Valid

Sumber : Hasil Responden, SPSS (Data Diolah Kembali Tahun 2023)

Hasil di atas, pengolahan data variabel bebas dan variabel terikat yang di dapatkan dari pengolahan data menggunakan program SPSS vers 22 menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, artinya dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel bebas dan variabel terikat valid.

Uji Reliabilitas Merupakan alat untuk mengukur suatu angket yang merupakan bagian dari indikator variabel. Sebuah angket dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai Cronbach Alpha < 0,60. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji reliabilitas variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Informasi Laporan Keuangan Daerah:

Uji Reliabilitas

Tabel 9 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	3

Sumber : Hasil Output SPSS, 2023

Berdasarkan pada data tabel di atas, dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel memperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,710. Oleh karena itu nilai Cronbach Alpha variabel pada penelitian ini lebih besar dari pada nilai Cronbach Alpha 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah data yang digunakan untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal mempunyai pola distribusi seperti kurva berbentuk bel. Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika nilai signifikan atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima atau data berdistribusi normal.

Jika nilai signifikan atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau tidak berdistribusi normal.

Tabel 10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.53376993
Most Extreme Differences	Absolute	.199
	Positive	.146
	Negative	-.199
Kolmogorov-Smirnov Z		1.759
Asymp. Sig. (2-tailed)		.409

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, tahun 2023

Dari tabel dijelaskan bahwa uji statistic Kormogorov-Smirnov menunjukkan nilai asymp. Sig.(2-tailed) sebesar $0,409 > 0,05$ yang berarti data penelitian tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* berlawanan dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang besarnya diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebas. Hasil uji Multikolinearitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.986	1.015
	X2	.986	1.015

Sumber : Output SPSS, tahun 2023

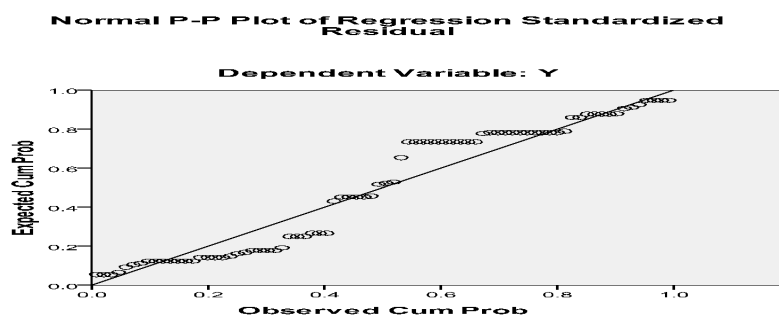
Tabel diatas menunjukkan bahwa uji multikolinearitas memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 yaitu sebesar 0,986 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 1,015, maka data penelitian tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas yaitu antara variable

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yang digunakan sebagai instrumen penelitian

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas. sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas

Grafik probabilitas pada gambar di atas terlihat bahwa data sudah normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tidak bebas (dependent). Analisis regresi berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Dalam penelitian ini dikonversikan untuk menguji ada tidaknya pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Tabel 12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.525	4.249		6.008	.000
X1	.318	.153	.230	2.078	.041
X2	.180	.113	.176	1.589	.116

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS, tahun 2023

Tabel diatas hasil perhitungan pengujian regresi disusun dalam suatu model:

$$Y = 25,525 + 0,318X_1 + 0,180X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel informasi Laporan Keuangan Daerah

X1 = Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X2 = Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dari hasil regresi linier berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 25,525. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika X1 (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah), X2 (Kompetensi Sumber Daya Manusia), konstanta atau $X=0$, maka nilai *variable* Informasi Laporan Keuangan Daerah adalah 25,525.
- Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,318. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan penyebab Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 1%, maka Informasi Laporan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya 31,8% dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,180. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan penyebab Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1%, maka Informasi Laporan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya yaitu 18% dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur presentase pengaruh variabel-variabel bebas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.306 ^a	.363	.069	3.58058

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* 0.363 berarti 36,3% variabel Informasi Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan sisanya sebesar 63,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini

Uji Hipotesis

a. Uji t parsial

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial atau menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t berpengaruh apabila hasil perhitungan thitung lebih besar dari ttabel atau probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5% ($\text{Sig} < 0,05$).

Adapun hasil uji t (parsial), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Hasil Uji t Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	T tabel	Sig.	Ket
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	25.525	4.249		6.008		.000	
X1	.318	.153	.230	2.078	1,665	.041	Berpengaruh
X2	.180	.113	.176	1.589	1,665	.116	Tidak Berpengaruh

a. Dependent Variable: Y

Dengan jumlah sampel (n) = 78 jumlah parameter (k) = 3, $df = (n-k) = 78 - 3 = 75$ maka pada tingkat kesalahan $\alpha = 0.05$, diperoleh t tabel = 1,665

Berdasarkan tabel di atas hasil uji parsial dapat dijabarkan sebagai berikut:

- i. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,078 > t tabel 1,665 dan nilai signifikansi sebesar 0,041 < 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah. Maka hipotesis pertama dapat diterima.
- ii. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,589 < t tabel 1,665 dan nilai signifikansi sebesar 0,116 > 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah, Maka hipotesis kedua ditolak.

b. Uji F simultan

Tabel 15 Hasil Uji F Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99.332	2	49.666	3.874	.025 ^a
	Residual	961.540	75	12.821		
	Total	1060.872	77			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari hasil uji ANOVA dijelaskan bahwa terdapat nilai F hitung sebesar 3,874 dan F tabel yaitu 2.73 yang artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan probabilitas signifikan 0,025. Hal ini menandakan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Sehingga model regresi ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Informasi Laporan Keuangan Daerah. Maka hipotesis diterima

Pembahasan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, secara simultan berpengaruh terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan F hitung sebesar 3,874 dan F tabel yaitu 2.73 yang artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan probabilitas signifikan 0,025. Hal ini menandakan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,589 < t tabel 1,665 dan nilai signifikansi sebesar 0,116 > 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah, Maka hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan uji t tersebut artinya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah walaupun dibarengi dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, masih belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ditolaknya hipotesis ini dapat dijelaskan, karena belum maksimalnya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong, yang disebabkan keterbatasan teknologi dan sarana prasarana yang dimiliki. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa masih belum memadainya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah kabupaten Tabalong, agar menjadi perhatian khusus bagi kepala BPKAD dan Pemerintahan Kabupaten Tabalong.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan nilai thitung sebesar 2,078 > ttabel 1,665 dan nilai signifikansi sebesar 0,041 < 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah. Maka hipotesis pertama dapat diterima

Dalam ranah organisasi publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi yang baik. Seseorang dengan pengetahuan dan ketrampilannya akan bekerja dengan mudah, cepat dan dengan pengalamannya mampu meminimalisir kesalahan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Selain itu, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi yang akhirnya bermuara pada terciptanya good governance dan berdampak pada seberapa jauh nilai informasi laporan keuangan yang dibuat serta kesesuaiannya terhadap standar yang berlaku.

Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pemegang amanah dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah sudah dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang serta kewajiban deskripsi jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan adanya peraturan ini maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus terus dilakukan seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan SIMDA, bimbingan teknik (BIMTEK), sosialisasi perubahan kebijakan. Dalam hal ini, apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dimana akan berdampak pada kinerja organisasi publik yang baik.

Berdasarkan table menunjukkan *Standardized Coefficients Beta* untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai sebesar 0,230, sementara untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menunjukkan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,176. Yang artinya dari dua variabel bebas tersebut memiliki nilai pengaruh lebih besar terhadap informasi laporan keuangan adalah variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

- a. Menerapkan prinsip akuntansi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabalong. LKPD yang disusun dan disajikan sesuai dengan SAP akan memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan LKPD yang tidak sesuai dengan SAP.

- b. Melaksanakan atau mengimplementasikan sistem akuntansi sesuai dengan pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan mempengaruhi tingkat kualitas LKPD Kabupaten Tabalong. Semakin baik OPD menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. Sumber daya manusia memiliki pengaruh dalam mengukur tingkat kualitas LKPD Kabupaten Tabalong, dimana kompetensi yang dimiliki setiap pegawai bagian keuangan harus memiliki pengetahuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, keterampilan individu, dan sikap atau perilaku sebagai akuntan. Sehingga akan lebih baik jika setiap OPD Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi selalu memperhatikan tingkat kompetensi pegawai bagian keuangan.
- a. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memperbaiki masalah-masalah yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terjadi dalam 4 sampai dengan 5 tahun ke belakang, serta sehubungan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia agar lebih diperhatikan dan ditingkatkan untuk memperoleh tingkat kualitas LKPD dengan memperoleh opini WTP.

Kesimpulan

Sistem Akuntansi Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Parsial Dan Signifikan Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Maka hipotesis pertama di terima. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Dominan Terhadap Informasi Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,230

Daftar Pustaka

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Djoko Wibowo. — Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin). *Kindai* 18, no. 1 (2022): 16–29.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2018. Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hery. 2018. Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I), Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS.
- Isnaen, Fauzi, and Fauzan Akbar Albastiah. — Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2021): 67–87.
- Khairunnas, Teguh Erawati, and Anita Primastiwi. — Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2021): 483–97.

- Luthans, Fred. 2018. *Perilaku Organisasi*, (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk), Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2018. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3 Nomor. 2 Tahun 2014
- Pangertika, Fierda. 2016. Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerinth Daerah Kabupaten Temanggung. 2 Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Pratiwi, Peggy Triani, 2014. Pengaruh Pengendalian internal Terhadap Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy. 2018. *Organizational behavior*. Fourteenth Edition. Pearson education. New Jersey 07458. 77-89
- Santoso, Singgih, 2014, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sari, Novita. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perusahaan. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Siwambudi, I., Yasa, G. W., & Badera, I. 2017. Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Soeprihanto, John. 2017. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Edisi pertama Cetakan kelima. Yogyakarta: BPF
- Sopiah. 2018. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *SNA XI Pontianak*.
- Wibowo, 2018. *Manajemen Kinerja*, Edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta.